

Perkotaan

Senin, 06 Mei 2013 | 14:40:10 WIB

DKI Segera Tertibkan Hunian Kolong Tol JIUT



ISTIMEWA

JAKARTA -Pemprov DKI Jakarta segera menertibkan hunian ilegal di kolong jalan tol, Jakarta Intra Urbans Toll (JIUT), khususnya di kawasan Jembatan Tiga, Bandengan, Jakarta Barat. Puluhan bangunan semi permanen yang kumuh berdiri di sana, sehingga rawan terjadi kebakaran yang dapat membahayakan struktur bangunan jalan tol.

“Saya minta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, segera menertibkan hunian kumuh di bawah kolong tol di Jembatan Tiga. Kita tidak akan membiarkan hunian itu tambah marak. Bila dibiarkan permukiman warga di sana mengundang kerawanan. Kalau sampai terjadi kebakaran maka berpotensi merusak bangunan jalan tol. Itu membahayakan,” ujar Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, kemarin.

Sebelum permukiman itu ditertibkan, Pemprov DKI telah menyiapkan rumah susun (rusun) di Marunda untuk menampung warga penghuni kolong tol Jembatan Tiga. “Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI sejak awal 2013, telah memperbaiki ratusan rusun di Marunda, jika sudah selesai direhab, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat segera melakukan sosialisasi kepada warga untuk pindah ke rusun,” kata Ahok-sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama.

Lebih lanjut Ahok menegaskan, warga eks penghuni kolong tol, yang ber-KTP DKI, tidak dikenai biaya untuk menghuni rusun Marunda. Bahkan tiga bulan pertama mereka tak dibebani sewa. “Warga yang punya pekerjaan di wilayah Jembatan Tiga, disubsidi biaya transportnya dari Marunda-Jembatan Tiga pergi-pulang,” katanya menambahkan.

Setelah ditertibkan, area eks hunian kumuh di kolong tol itu akan dimanfaatkan untuk parkir sepeda motor, dan sebagian lagi dijadikan taman kota. “Area yang dimanfaatkan untuk parkir itu hanya yang berdekatan dengan halte bus Transjakarta. Kalau tersedia tempat parkir yang

baik dan terjangkau, maka warga akan meninggalkan motornya di sana, kemudian melanjutkan perjalanannya menggunakan busway,” tutur Ahok, mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sebenarnya, pengelola jalan tol JJUT pernah mengkaji optimalisasi arena bawah tol dibangun jalan alteri baru. Ini juga untuk menambah luas jalan tanpa membebaskan lahan, hal itu sulit diwujudkan.

“Lahan itu menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga kita tidak bisa membangun jalan untuk menambah ruas jalan alteri. Disamping itu, area kolong tol tidak terlalu maksimal untuk dimanfaatkan sebagai jalan alteri,” katanya lagi.

Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI, Zainudin MH mendukung penertiban area permukiman kumuh di bawah tol JJUT. Tugas Pemprov DKI dan jajaranya adalah meyakinkan penghuni agar mau ditertibkan , dan pindah rusun.

“Dewan mendukung penuh penertiban permukiman kumuh kolong tol, yang perlu diperhatikan agar warga Jakarta dipindah ke rusun agar mereka menempati hunian yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Zainudin MH.

Saran pengelola JJUT agar area kolong tol yang dihuni warga dibangun jalan untuk menambah kapasitas jalan alteri, tentu sebagai usulan yang cerdas, dan mestinya dapat diwujudkan.

“Bahwa lahan itu kewenangannya ada di pemerintah pusat, kan Pemprov DKI tinggal dikoordinasikan saja, untuk kepentingan warga Jakarta, kenapa tidak. Toh menambah kapasitas jalan tanpa membebaskan itu sangat menguntungkan warga,” ucap Zainudin. suh